



**LAPORAN BULANAN SIDANG PARIPURNA**  
**BAGIAN DUKUNGAN PELAYANAN PENGADUAN**  
**BULAN JANUARI 2017**

**Pendahuluan**

Fungsi pokok Komnas HAM yang paling dikenal oleh rakyat Indonesia adalah menerima dan memeriksa kasus atau peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu Komnas HAM jelas berwenang untuk menerima pengaduan tentang peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM, sepanjang pengaduan tersebut disampaikan sesuai dengan tata cara dan prosedur pengaduan yang telah ditentukan. Dan juga oleh karena itu, Pengaduan menjadi salah satu ujung tombak Komnas HAM dalam berhadapan dengan pengadu.

Berdasarkan ketentuan tersebut, bersama ini dilaporkan serangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Bagian Dukungan Pelayanan Pelayanan Pengaduan dengan rincian sebagai berikut:

**A. Laporan Data Penerimaan Pengaduan**

Pada 1 sampai dengan 31 Januari 2017, Komnas HAM melalui Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan telah menerima berkas pengaduan dengan jumlah **490 berkas**.

Adapun rinciannya sebagai berikut:

**1. Wilayah asal pengadu / pelapor**

No	Wilayah Asal Pengadu / Pelapor	Jumlah	No	Wilayah Asal Pengadu / Pelapor	Jumlah
1	Aceh	5	20	Kalimantan Barat	5
2	Sumatera Utara	51	21	Kalimantan Selatan	7
3	Bengkulu	5	22	Kalimantan Tengah	2
4	Jambi	6	23	Kalimantan Timur	10
5	Riau	13	24	Kalimantan Utara	1
6	Sumatera Barat	22	25	Gorontalo	1
7	Sumatera Selatan	20	26	Sulawesi Selatan	11

8	Lampung	10	27	Sulawesi Tenggara	3
9	Kepulauan Bangka Belitung	1	28	Sulawesi Tengah	5
10	Kepulauan Riau	7	29	Sulawesi Utara	9
11	Banten	15	30	Sulawesi Barat	0
12	Jawa Barat	47	31	Sulawesi Selatan Barat	1
13	DKI Jakarta	106	32	Maluku	13
14	Jawa Tengah	17	33	Maluku Utara	2
15	Jawa Timur	44	34	Papua	4
16	Daerah Istimewa Yogyakarta	8	35	Papua Barat	4
17	Bali	3	36	Tanpa Alamat	21
18	Nusa Tenggara Barat	4			
19	Nusa Tenggara Timur	7		Jumlah	490

## 2. Distribusi berkas pengaduan

No	Distribusi Berkas Pengaduan	Jumlah Berkas
1	Subkomisi pemantauan dan penyelidikan	260
2	Subkomisi mediasi	50
3	Tim 65	7
4	Tim KZ	0
5	Tim	1
6	File	172
Jumlah		490

## 3. Jenis berkas pengaduan

No	Jenis Surat	Jumlah berkas
1	Langsung	246
2	Tembusan	243
3	Tidak ditujukan/ ditembuskan ke Komnas HAM	1
Jumlah		490

## 4. Cara penyampaian berkas

No	Cara Penyampaian	Jumlah berkas
1	Datang langsung	34
2	Pos	424
3	Fax	9
4	Email	19
5	Audiensi	2

6	Diterima di lapangan / inisiatif / proaktif/ Kondisi Khusus	2
Jumlah		490

## 5. Klasifikasi hak

No	Klasifikasi / Tema Hak	Jumlah berkas
1	Hak untuk hidup	9
2	Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	0
3	Hak mengembangkan diri	7
4	Hak memperoleh keadilan	182
5	Hak atas kebebasan pribadi	7
6	Hak atas rasa aman	47
7	Hak atas kesejahteraan	185
8	Hak turut serta dalam pemerintahan	7
9	Hak perempuan	0
10	Hak anak	0
11	Hak tidak diperlakukan diskriminatif	1
12	Non HAM	45
Jumlah		490

### 5.1. Klasifikasi pengaduan

<b>I. Hak Untuk Hidup</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Mempertahankan hidup	4
Lingkungan hidup	5
	9
<b>II. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Pengabaian hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	0
	0
<b>III. Hak mengembangkan diri</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Hak atas pendidikan	6
Hak atas kebebasan mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya	1
	7
<b>IV. Hak memperoleh keadilan</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Kesewenang-wenangan proses hukum di kepolisian/militer/PPNS	127
Kesewenang-wenangan proses hukum di kejaksaan	8
Kesewenang-wenangan proses hukum di peradilan	41

Kesewenang-wenangan pemenuhan hak terhadap warga binaan / narapidana	6
	182
<b>V. Hak atas kebebasan pribadi</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Keutuhan pribadi	0
Kebebasan beragama dan berkeyakinan	3
Mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat	1
Berkumpul, berapat, dan berserikat	3
Pembatasan pendirian kelompok atau organisasi	0
Menyampaikan pendapat di muka umum	0
Status kewarganegaraan	0
Bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah RI	0
	7
<b>VI. Hak atas rasa aman</b>	
Mencari suaka	1
Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya	14
Hak atas rasa aman, tenteram, dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu	12
Hak atas kebebasan gangguan terhadap tempat tinggal	6
Hak atas kerahasiaan dalam hubungan surat menyurat	0
Bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan	8
Bebas dari kesewenang-wenangan penangkapan, penahanan, pengucilan, pengasingan, atau pembuangan	6
	47
<b>VII. Hak atas kesejahteraan</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Hak untuk mempunyai milik	12
Hak atas kepemilikan tanah	88
Tidak dipenuhinya syarat-syarat ketenagakerjaan	40
Tidak dipenuhinya syarat-syarat kepegawaian	13
Hak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak	23
Hak atas kesehatan	7
Pengabaian pemenuhan hak buruh migran	2
	185
<b>VIII. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Hak dipilih dan memilih dalam pemilu	3

Hak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantara wakil	
Hak mengajukan pengaduan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih	4
	7
<b>IX. Hak perempuan</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Hak keterwakilan perempuan dalam pemilu serta dalam pemilihan anggota badan legislatif, eksekutif dan yudikatif	0
Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran	0
Memilih, dipilih dan diangkat dalam pekerjaan dan jabatan	0
Hak mendapatkan perlindungan khusus berkaitan dengan fungsi reproduksi perempuan	0
Hak atas kesetaraan dengan suami	0
	0
<b>X. Hak anak</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Pengabaian terhadap hak kelangsungan hidup	0
Pengabaian terhadap hak mendapatkan perlindungan	0
Pengabaian terhadap hak untuk tumbuh kembang	0
Pengabaian terhadap hak untuk berpartisipasi	0
	0
<b>XI. Hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Pemberlakuan perbedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan ras dan etnis	1
Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras atau etnis	0
	1
<b>XII. Non HAM</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Non Ham	45
<b>Jumlah Seluruh</b>	<b>490</b>

## 6. Klasifikasi korban

No	Klasifikasi Korban	Jumlah berkas
1	Individu - Orang seorang	<b>251</b>
2	Individu - Anak	<b>4</b>
3	Individu - Perempuan	<b>11</b>
4	Individu - Buruh migran	<b>1</b>
5	Individu - Pekerja / profesi	<b>18</b>
6	Individu - Suku	<b>0</b>
7	Individu - Ras dan etnis	<b>0</b>

8	Individu - Agama dan penghayat kepercayaan	0
9	Individu - Penyandang disabilitas	1
10	Individu - Teroris	0
11	Individu - Korban pelanggaran HAM masa lalu	5
12	Individu - Lansia	1
13	Individu - Fakir miskin	0
14	Individu - Narapidana	4
15	Kelompok - Masyarakat	103
16	Kelompok - Anak-anak	2
17	Kelompok - Perempuan	0
18	Kelompok - Buruh migran	0
19	Kelompok - Pekerja / profesi	28
20	Kelompok - Masyarakat adat	14
21	Kelompok - Ras dan etnis	1
22	Kelompok - Agama dan penghayat kepercayaan	4
23	Kelompok - Penyandang disabilitas	0
24	Kelompok - LGBT	0
25	Kelompok - Teroris	0
26	Kelompok - Korban pelanggaran HAM masa lalu	1
27	Kelompok - Lansia	1
28	Kelompok - Narapidana	0
29	Organisasi	0
30	Warga negara asing	0
31	Polri	0
32	Korporasi	5
33	Lembaga Pendidikan	1
34	Lembaga Peradilan	0
35	Pemerintah Daerah	0
36	Tanpa Identitas/ Tidak diketahui	34

## 7. Klasifikasi pihak yang diadukan

No	Klasifikasi Pihak Yang Diadukan	Jumlah berkas
1	Pemerintah pusat (Kementerian)	41
2	Pemerintah daerah	57
3	Lembaga legislatif	2
4	Lembaga negara (Non kementerian)	7
5	Lembaga peradilan	36
6	Kepolisian	150
7	TNI	16
8	Kejaksaan	13
9	Lembaga pemasyarakatan dan / atau Rutan	2
10	Pemerintah negara lain	2

11	Korporasi	72
12	BUMN / BUMD	22
13	Lembaga pelayanan kesehatan	4
14	Lembaga pendidikan	10
15	Organisasi	3
16	Individu - Orang seorang	9
17	Individu - Perempuan	0
18	Individu - Anak	0
19	Individu - Pekerja / profesi	2
20	Individu - Suku	1
21	Kelompok - Masyarakat	3
22	Kelompok - Masyarakat adat	0
23	Kelompok - Ras dan etnis	0
24	Kelompok - Pekerja	0
25	Kelompok - Agama dan Penghayat Kepercayaan	0
26	Tanpa Keterangan Pihak yang Diadukan	38

#### 8. Pengaduan yang belum dan/atau tidak diteruskan ke Bagian Pemantauan atau Bagian Mediasi serta ditangani oleh Komisioner Otto Nur Abdullah

Sejak 2014 Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan juga menyusun dan mengeluarkan surat dengan maksud untuk (a) meminta kelengkapan berkas sebagaimana diatur dalam pasal 90 UU No 39 Tahun 1999<sup>1</sup>, (b) surat keluar untuk berkas file yaitu berkas yang tidak memenuhi syarat untuk dapat diprosesnya suatu berkas pengaduan sebagaimana diatur dalam pasal 91 UU No 39 Tahun 1999<sup>2</sup> dan dinilai sebagai berkas yang tidak dan/atau belum ditemukan adanya bentuk pelanggaran HAM, dan (c) ucapan terima kasih. Kegiatan ini tetap dilaksanakan sampai dengan Juni 2016 sebagai salah satu kegiatan reguler dari Subbagian ini dengan perincian sebagai berikut:

##### Deskripsi berkas yang belum dan/atau tidak diteruskan ke Pemantauan atau Mediasi

Kategori surat keluar			Total jumlah berkas yang tidak diteruskan
Kelengkapan berkas	Bukan pelanggaran HAM	Ucapan terima kasih	
27	73	23	123

<sup>1</sup> Berkas dengan kategori kelengkapan berkas, segera setelah pengadu mengirimkan jenis kelengkapan berkas yang diminta, akan dikirimkan ke Bagian Pemantauan atau Mediasi

<sup>2</sup> Berkas dengan kategori file, tidak akan diteruskan ke Bagian Pemantauan atau Bagian Mediasi

Surat keluar dari Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan ini diproses oleh Analis, diperiksa dan disetujui oleh Kabag. DPP, **diperiksa dan ditandatangani oleh Komisioner Otto Nur Abdullah.**

#### **9. Penomoran kasus untuk pengaduan baru 1 (satu) kali**

Periode Januari 2017, Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan memberikan nomor kasus untuk berkas pengaduan baru 1 (satu) kali dengan perincian distribusi sebagai berikut:

Pemantauan	Mediasi	Jumlah
65	18	83

#### **B. Penutup**

Demikian laporan bulanan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan ini dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan mandat yang telah diberikan.

Jakarta, 1 Februari 2017

**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA**

**a.n. KEPALA BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM**

**KEPALA BAGIAN DUKUNGAN PELAYANAN PENGADUAN**

**Rima Purnama Salim**